

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tanggung Jawab Yayasan Lembaga Pendidikan Terhadap Kebutuhan Sekolah.

1. Pengertian Yayasan Lembaga Pendidikan.

Yang dimaksud dengan yayasan adalah tempat bergantung yang bersifat kebetulan, maka sudah selayaknya bila dalam yayasan itu terdapat kekurangan-kekurangan dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan jika dibandingkan dengan yang diselenggarakan oleh orang tua. Hal yang umum yang dirasa sebagai kekurangan dari kedua tempat bergantung yang kebetulan ini ialah tidak adanya atau kurangnya rasa cinta kasih sayang orang tua yang dirasakan oleh anak-anaknya.¹

2. Fungsi Yayasan Lembaga Pendidikan.

Suatu kenyataan bahwa sekolah swasta pada mulanya didirikan oleh masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan oleh karena itu merekalah yang berkewajiban untuk menyediakan segala macam kebutuhannya. Adapun pihak lain hanyalah bersifat memberikan bantuan saja, dan tidak ikut bertanggung jawab.

¹Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Malang: FIP IKIP Malang, 1975) h.102

"Semua usaha pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta, semuanya harus menanggung keseluruhan kebutuhan tenaga pendidikan, kebutuhan sehari-hari, saran prasarana, inventaris dan pembiayaan".²

Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan adayang sengaja diadakan (usaha sadar) ada yang tidak usaha sadar dari orang dewasa nomatif disebut pendidikan, sedang yang lain disebut pengaruh. Lingkungan yang sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada tiga yaitu : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini disebut dengan lembaga pendidikan atau satuan pendidikan .³

Adapun penjelasan dari ketiga lembaga di atas sebagai berikut:

a. Lembaga Pendidikan Keluarga.

Keluarga adalah merupakan lingkungan pertama bagi anak, di lingkungan keluarga petama-tama anak mendapatkan pengaruh sadar. Karena itu keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, yang bersifat informal dan kodrati. Fungsi lembaga pendidikan keluarga sebagai berikut:

- 1) Merupakan pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak.
- 2) Pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang.
- 3) Di dalam keluarga terbentuk pendidikan moral.

² Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 220

³ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h.16

- 4) Di dalam keluarga akan tumbuh sikap tolong menolong, tenggang rasa, sehingga tumbuhlah kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera.
- 5) Keluarga merupakan lembaga yang memang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama.
- 6) Di dalam konteks membangun anak sebagai makhluk individu diarahkan agar anak dapat mengembangkan dan menolong dirinya sendiri.⁴

b. Lembaga Pendidikan Sekolah.

Dalam hal ini sekolah merupakan sebagai pendidikan formal, ia lahir berkembang dari pemikiran efisiensi dan aktivitas di dalam pemberian pendidikan kepada warga masyarakat. Lembaga pendidikan formal atau persekolahan adalah kelahiran dan pertumbuhannya dari dan untuk masyarakat bersangkutan.⁵

Jadi sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat oleh karena itu segala bentuk tujuan sekolah kesemuanya mesti diarahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat sebagai yang menjadi target atau saran pendidikan di masyarakat bersangkutan.

c. Lembaga Pendidikan Masyarakat.

Pendidikan kemasyarakatan adalah usaha sadar yang juga memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural, keagamaan,

⁴ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h.18

⁵ Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h.241

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketrampilan, keahlian (profesi), yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakat.⁶

Pendidikan kemasyarakatan dapat dilaksanakan oleh berbagai lembaga dengan berbagai program pendidikan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Karena itu pendidikan kemasyarakatan, seperti juga yang lain tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, pribadi, keluarga, organisasi, dan himpunan dalam masyarakat keagamaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial dan profesional.

Pendidikan kemasyarakatan mempunyai andil yang besar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, dalam peranannya sebagai berikut:

- 1) Pendidikan manusia sebagai makhluk individu.
- 2) Pendidikan manusia sebagai makhluk susila.
- 3) Pendidikan manusia sebagai makhluk sosial.
- 4) Pendidikan manusia sebagai makhluk religius.⁷

3. Tugas Yayasan Lembaga Pendidikan.

Adapun tugas yayasan lembaga pendidikan yang berkenaan dengan tanggung jawabnya dalam menyediakan kebutuhan sekolah swasta, dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu menyediakan

⁶ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h.33

⁷ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h.36

kurikulum, menyediakan personalia sekolah, menyediakan saran prasarana dan menyediakan biaya pendidikan dan pengajaran.

Dari semua kebutuhan tersebut diatas sudah barang tentu pengurus yayasan harus mempertimbangkan terlebih dahulu kebutuhan yang mana harus mendapatkan prioritas utama dan kebutuhan mana yang kiranya masih dapat ditunda pemenuhannya.

a. Menyediakan Kurikulum

Yayasan sebagai badan yang bertanggung jawab atas kebutuhan sekolah, maka merekalah yang bertanggung jawab untuk mengadakan kurikulum. Semua lembaga pendidikan baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun yang didirikan oleh swasta tentu mempunyai tujuan.

Rumusan tujuan pendidikan yang telah diolah oleh pembina atau pengurus yayasan sebagai badan yang bertanggung jawab tidak dapat berhasil dengan baik apabila tidak disediakan kurikulum. Jadi penyediaan kurikulum bagi sekolah adalah merupakan hal yang tak dapat dielakkan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan itu.

b. Menyediakan Personalia Sekolah

Sebagian tanggung jawab pengurus yayasan dalam menyediakan kebutuhan sekolah adalah menyediakan personalia sekolah. Penyediaan personalia sekolah itu meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pengajar, tenaga administrasi dan pesuruh. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dari

aturan yang semestinya. Artinya tidak terjadi fihak-fihak lain yang dengan sewenang-wenang memasukkan tenaga pengajar atau tenaga administrasi tanpa sepengetahuan pimpinan yayasan.

Untuk menghindari hal-hal yang negatif tersebut tepatlah apabila ada personalia sekolah yang baru, maka secara organisasi sekolah yang baru, maka secara organisatoris pimpinan yayasan memberikan Surat Keputusan (SK) sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya menghindari adanya fihak lain yang mengabaikan fungsi dan tanggung jawab pengurus yayasan yang mengelola sekolah itu.

c. Menyediakan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah komponen yang ikut menentukan baik tidaknya proses pendidikan dan pengajaran. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran tanpa ditunjang oleh sarana dan prasarana yang menyakinkan akan membawa efek yang negatif. Oleh karenanya maka masalah sarana dan prasarana adalah merupakan masalah pokok yang tak dapat diabaikan begitu saja.

Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi:

- 1) Tanah untuk tempat gedung/bangunan lain dan lapangan.
- 2) Bagunanan Sekolah meliputi : kantor, ruangan belajar, ruang perpustakaan, laboratorium dan lain sebagainya.
- 3) Menyediakan perpustakaan sekolah dengan segala perlengkapannya.

4) Menyediakan perabot sekolah dan perlengkapan yang lain.

Dari kesekian kebutuhan tersebut pengurus yayasan sudah sewajarnya harus mempertimbangkan sarana dan prasarana yang harus didahulukan penyediaannya.

d. Menyediakan Biaya Pendidikan Dan Pengajaran.

Semua orang telah sepakat bahwa uang merupakan kunci dari segala kegiatan yang ada pada seluruh jenjang sekolah. Oleh karena itu uang dapat dikatakan sebagai roda dari segala kegiatan. Tanpa adanya uang sebagai penunjang yang cukup suatu program sulit berhasil dengan baik. Pengurus yayasan sebagai pembina sekolah adalah bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan keuangan sekolah, termasuk didalamnya segala kegiatan pelaksanaan pendidikan atau pengajaran, baik untuk pelaksanaan kurikulum ataupun yang lain. Demikian pula dengan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan sehari-hari, gaji tenaga kependidikan, tunjangan-tunjangan, kebutuhan untuk kesejahteraan personalia sekolah dan lain sebagainya.

Pengurus yayasan sebagai pembina sekolah, mereka berkewajiban merumuskan sumber-sumber keuangan, baik yang berasal dari intern pengurus yayasan maupun yang bersal dari fihak-fihak lain. Pengurus yayasan sebagai pembina, mereka bertanggung jawab akan adanya sumber-sumber permanen dengan menyakinkan

terutama yang berasal dari dari intern yayasan itu. Demikian ini sangat perlu karena semakin tinggi dan baiknya sumber dana dari pengurus yayasan, maka semakin tinggi pula kemungkinannya untuk lebih berhasil dalam melaksanakan tugas menyediakan kebutuhan sekolah.

Pada dasarnya sumber keuangan yayasan selain dari sumber intern, secara garis besar dapat di golongkan menjadi 3 yaitu dari pemerintah, masyarakat dan wali murid.

1) Sumber Keuangan Dari Pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan uang pada sekolah swasta, pengurus yayasan dapat mengusahakan sumber keuangan dari pemerintah, bantuan pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Adapun macam-macam bantuan itu terdiri dari bantuan yang berupa uang, bantuan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan tenaga kependidikan, dan bantuan lain menurut keperluan.⁸

Bantuan uang dapat oleh sekolah swasta kepada pemerintah untuk keperluan biaya-biaya sebagai berikut:

- a) Biaya operasional sekolah
- b) Biaya beli peralatan sekolah.
- c) Biaya rehabilitas gedung.
- d) Biaya pembangunan ruang kelas baru (RKB).

⁸ Moendisari Soenarjo, *Pembinaan Administrasi bagi SMP/SMA Swasta*, (Surabaya:Kasi Swasta Bidang Dikmenum, 1988), h.13

Bantuan uang tersebut di atas dapat diberikan kepada sekolah swasta yang memenuhi syarat, atas dasar permohonan bantuan yang diajukan, dengan ketentuan bahwa satu sekolah dalam waktu satu tahun anggaran biaya sebagaimana yang disebutkan di atas.⁹

Adapun besarnya bantuan pemerintah tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Bab IV pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 28/1982, didasarkan pada sekolah negeri yang setingkat atau sejenis. Dan dalam Pasal 8 Ayat 1 Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0375/U/1982, bantuan uang ditetapkan setinggi-tingginya 50% dari ukuran sekolah negeri yang sejenis dengan memperhitungkan pendapatan dari sekolah swasta yang bersangkutan dan jumlah murid sekolah yang bersangkutan.¹⁰ Jadi bantuan tersebut setiap tahun berubah sesuai dengan prioritas dan kondisi jumlah siswa.

2) Sumber Keuangan Dari Masyarakat.

Yang kami maksud masyarakat adalah masyarakat secara umum, selain pemerintah dan wali murid. Suatu hal yang tak dapat diabaikan adalah partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk memberi bantuan kepada sekolah, semakin tinggi pula kemungkinan pengurus yayasan untuk memenuhi kebutuhan sekolah swasta.

⁹ Moendisari Soenarjo, *Pembinaan Administrasi bagi SMP/SMA Swasta*, (Surabaya:Kasi Swasta Bidang Dikmenum, 1988), h.17

¹⁰ Ibid, 1988:17

Pengurus yayasan sebagai salah satu bagian dari masyarakat tidak lepas dari kewajiban untuk memberikan bantuan dalam mendukung pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing personal. Bantuan masyarakat kepada sekolah swasta dapat berasal dari organisasi, kelompok atau pribadi, yang merasa terpanggil untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Demikian ini akan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang telah ditetapkan.

Terpenuhinya kebutuhan sekolah akan banyak tergantung pada kecakapan pengurus yayasan dalam mengusahakan kebutuhan tersebut. Jika pengurus yayasan dapat bekerja sama yang baik dengan masyarakat. Maka akan timbul hubungan timbal balik yang baik pula. Saya yakin bahwa semakin baik hubungan pengurus dengan masyarakat maka akan semakin tinggi pula kemungkinan masyarakat itu dalam memberikan sumbangan kepada sekolah.

Bentuk sumbangan masyarakat kepada sekolah dapat berupa sumbangan/bantuan sukarela atau donator tetap. Berkenaan dengan sukarela ini telah banyak pula ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajarkan tentang memberikan bantuan/shodaqoh untuk kepentingan umat Islam di berbagai aspek.

Adapun tehnik shodaqoh menurut Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya sebagai berikut.

عن بي هريرة ر ضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وابداء بمن تعول – رواى البخار.

Artinya: Dari Abu Hurairah RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Sebaik-baik shodaqoh adalah apa yang dari orang kaya dan dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu.” (HR. Bukhory).¹¹

Berdasarkan hadist di atas maka lembaga pendidikan pengurus yayasan termasuk yang menjadi tanggungannya, dan adalah baik sekali bershodaqoh hendaknya dilandasi dengan ikhlas dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarganya, hal ini dimaksudkan agar tidak berakibatkan negatif disemua fihak.

Dalam melaksanakan shodaqoh Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan pelajaran antara lain :

عن اسماء بنت ابى بكر الصديق ر ضى الله عنها قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتوكى فيوكى الله عليك وفي رواية انفقى او انفقى و انضحى ولا تحصى فيحصى عليك ولا توعى فيعى الله عليكم متفق

Artinya: Asma binti Abu Bakar RA berkata:

Rasulullah SAW berpesan kepadaku: jangan kau menutupi kepunyaanmu, maka Allah SWT akan menutup rizkimu dalam riwayat lain: Belanjakanlah dan bersedakahlah dan jangan kau

¹¹ Musthofah Muhammad Imarah, *Jawahirul Bukhory*, (Darul Fikr, Mesir), tt : 433

hitung, supaya Allah jangan menghitung kamu dan jangan kau takar niscaya Allah akan membatasi padamu. (HR. Bukhory).

Dalam memberikan shodaqoh Allah SWT telah memberikan petunjuk agar memilih harta yang berharga, seperti tersebut dalam surah Al - Imron ayat 92 sebagai berikut :

لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون .

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian (Kebaikan yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai.¹²

Dari petunjuk Al-Qur'an dan Hadist tersebut di atas maka terbukalah kemungkinan bahwa masyarakat akan ikut berpartisipasi aktif dalam menyediakan kebutuhan dana sekolah. Apalagi pembiayaan sekolah swasta itu termasuk tanggung jawab masyarakat baik secara organisasi maupun secara individu.

Dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi kemungkinan dari mereka ada yang bersedia menjadi donator tetap, sehingga akan banyak membantu mengatasi kekurangan dana pendidikan yang memang pengaruhnya sangat dominan dalam mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

3) Sumber Keuangan Dari Wali Murid.

Orang tua murid (wali murid) berkewajiban membantu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, kecuali jika ada

¹² DEPAG RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir Alqur'an, 1974), h.91

pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang dapat membebaskannya dari kewajiban tersebut. Bantuan orang tua murid (wali murid) kepada sekolah pada umumnya terdiri dari dua macam yaitu:

- a) Sumbangan pembinaan pendidikan dan pengajaran
- b) Bantuan penyediaan dan perbaikan saran dan prasarana

Bantuan yang diberikan wali murid kepada sekolah adalah merupakan manifestasi dari tanggung jawab dan partisipasinya terhadap tercapainya tujuan pendidikan.

Besar kecilnya bantuan yang harus dipenuhi oleh wali murid hendaknya ditentukan oleh pengurus yayasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisis beberapa faktor di bawah ini:

- a) Anggapan wali murid terhadap penting tidaknya pendidikan
- b) Tingkat dan status ekonomi keluarga.
- c) Tergantung pula pada kegiatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.¹³

Dalam menentukan sumbangan wajib bagi orang tua/wali murid ketiga faktor tersebut benar-benar perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kelancaran pendidikan dan pengajaran. Ketentuan bantuan orang tua/wali murid yang pantas dan sesuai dengan kondisi serta situasi, akan membawa kepada suksesnya program pendidikan yang telah ditetapkan.

¹³ Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h.224

B. Tentang Kualitas Madrasah Ibtidaiyah.

1. Pengertian Kualitas Madrasah Ibtidaiyah.

Yang di maksud dengan kualitas yaitu kata kualitas berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti "Mutu".¹⁴ Adapun yang di maksud dengan kata kualitas di sini adalah mutu Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama sebagai hasil bina pengurus yayasan.

2. Pentingnya Kualitas Madrasah Ibtidaiyah.

Dalam hal ini kualitas Madrasah Ibtidaiyah sangat penting pada zaman sekarang karena kualitas sekolah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan pintar. Dalam hal ini kualitas Madrasah Ibtidaiyah sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam memilih suatu pendidikan tersebut.

Walaupun program peningkatan mutu pendidikan selama enam pelita secara terus menerus selalu dilaksanakan, namun pendidikan yang dicapai masih belum memuaskan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

- a) Salah satu indikator pendidikan yaitu Nilai Ebtanas Murni (NEM) masih jauh di bawah standar yang diinginkan.
- b) Dilihat dari aspek non akademik, banyak kritik terhadap masalah kedisiplinan, moral dan etika, kreativitas, kemandirian, dan sikap

¹⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) h.665

demokratis yang tidak mencerminkan tingkat kualitas yang diharapkan oleh masyarakat luas.

- c) Kemampuan guru sangat bervariasi.
- d) Kondisi lingkungan sekolah untuk menerapkan pendidikan yang bersifat non akademik (Kreativitas, Keamndirian, Demokarasi) juga relatife rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas pelaksana, staf, dan terutama guru, kurang dapat menerjemahkan konsep-konsep metodologis pada level sekolah, walaupun telah diadakan pre-service dan in-service training yang cukup intensif.¹⁵

3. Usaha-usaha Peningkatan Kualitas Madrasah Ibtidaiyah.

Dalam hal ini untuk usaha-usaha peningkatan kualitas Madrasah Ibtidaiyah pada pokoknya dibagi menjadi 3 sasaran yaitu pengawasan pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana dan pengawasan penggunaan biaya secara efektif dan efisien.

a) Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum.

Pembahasan tentang pengawasan pelaksanaan kurikulum akan membicarakan beberapa hal yakni tentang pengelolaan kurikulum, tentang prinsip-prinsip pembinaannya dan pengawasan pelaksanaannya.

1) Pengelolaan Kurikulum Sekolah.

Setiap usaha pendidikan tentu mempuyai tujuan, demikian pula semua sekolah yang ada di Indonesia ini. Tujuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagaimana tujuan yang dirumuskan

¹⁵ Indra Djati Sidi, 2001 : 71-72

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 sebagai berikut:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta didik agar menjadi manusai yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan diperlukan kurikulum yang meyakinkan. Hal ini karena kurikulum adalah merupakan terjemahan dari tujuan pendidikan. Tercapai tidaknya tujuan yang telah ditetapkan akan banyak ditentukan oleh rumusan kurikulum yang ditetapkan oleh yayasan. Pengurus yayasan sebagai penanggung jawab terhadap pemakaian kurikulum yang apabila rumusannya baik dan meyakinkan maka akan mampu menghasilkan lulusan yang baik pula, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Agar supaya tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik dan menghasilkan lulusan yang kwalified, maka diperlukan kurikulum yang memenuhi syarat, dalam hal ini pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional) telah menyediakan kurikulum untuk MI. Dengan demikian pengurus yayasan dapat menggunakan kurikulum

tersebut untuk keperluan sekolah yang berada di bawah binaannya. Sudah barang tentu dengan beberapa penambahan sebagai ciri khusus yayasan itu sendiri.

Yayasan-yayasan lokal yang berada dalam pembinaan Lembaga Pendidikan Ma'arif tentu akan menggunakan kurikulum yang dibuat oleh LP Ma'arif untuk kepentingan MI binaannya. Dengan demikian disamping pengurus yayasan menyediakan kurikulum yang di buat oleh pemerintah sebagai suatu kewajiban hukum dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat MA maka yayasan harus pula menyediakan kurikulum yang telah di buat oleh LP Ma'arif sebagai ketaatan pada induk yayasan, dan mempertahankan ciri khusus kema'arifan.

2) Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum.

Setiap pelaksanaan program kurikulum tentu membutuhkan supervisi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kurikulum yang mempunyai kualitas tinggi tanpa diadakan supervisi, maka kemungkinan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masih kurang menyakinkan.

Supervisi terhadap pelaksanaan kurikulum yang dipakai pengurus yayasan dapat menggunakan sistem training atau guide, atau kepengawasan yang demokratis.

"Adapun tehnik yang dipakai dapat berupa metode langsung atau tidak langsung. Dalam supervisi langsung, supervisor secara

langsung berhadapan dengan subyek pelaksana kurikulum baik perorangan ataupun kelompok. Adapun metode tidak langsung, supervisor tidak secara langsung berhadapan untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksana kurikulum, pola ini dapat berbentuk penerbitan buletin, papan pembina ataupun angket".¹⁶

Dengan demikian supervisi merupakan aktifitas untuk menentukan kondisi/syarat-syarat yang dapat menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya supervisi kondisi-kondisi yang dapat menentukan tercapainya tujuan pelaksanaan kurikulum dapat terpenuhi tanpa adanya halangan yang berarti.

b) Personalia Sekolah.

Kualitas personalia sekolah hal ini tidak lepas dari konsepsi personalia sekolah yang baik tentang pengadaannya, pembinaan dan pengembangannya, jabatan dan peningkatan kesejahteraan pegawainya.

1) Konsepsi Personalia Sekolah

Pada dasarnya yang di maksud dengan personalia sekolah di sini adalah kepala sekolah, tenaga pengajar, dan tenaga tata usaha.

2) Penumbuhan dan Pengembangan Jabatan.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan personalia pegawai, perlu peningkatan performance dan personalia disegala macam

¹⁶ Ngalim Purwanto dkk, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara Cetakan III, 1981), h.31-32.

jabatan yang telah diterima, baik kepala sekolah, dewan guru, tata usaha maupun tenaga kependidikan yang lain.

Kepala sekolah sebagai administrator akan banyak menentukan polisi pendidikan dan pengajaran. Itulah sebabnya maka diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang dapat menunjang pada jabatan yang diembannya. Demikian ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wasty Soemanto bahwa para administrator dari sekolah-sekolah yang maju ternyata lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan servis dari pada administrator-administrator sekolah yang kurang maju.¹⁷ Oleh karena itu dorongan dari pihak pengurus yayasan untuk meneliti kegiatan-kegiatan semacam inservis sangatlah menunjang dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.

Dalam mengembangkan jabatan pengurus yayasan harus peka terhadap situasi kerja guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Pengurus yayasan bersama-sama dengan kepala sekolah harus memilih orang yang akan di kirim kepenataran/kursus ataupun peningkatan ketrampilan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar demi kemajuan sekolah di masa datang.

Kualitas tenaga pengajar, tata usaha dalam penumbuhan dan pengembangan jabatan akan bermanfaat bagi sekolah yang bersangkutan. Demikian ini sesuai dengan pendapat Hendyat

¹⁷ Wasty Soemanto, *Pendidikan Profesi Bagi Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Usaha Nasional, 1982), h.30.

Soetopo Dan Wasty Soemanto yang telah merumuskan manfaat dari penumbuhan dan pengembangan jabatan antara lain menyebutkan:

- a) Meningkatkan kreatifitas dari tenaga kependidikan.
- b) Kemungkinan akan memperoleh hasil yang lebih besar
- c) Memperbaiki image terhadap organisasi/lembaga sebagai organisasi (lembaga yang maju).¹⁸

Penumbuhan dan pengembangan personalia sekolah pelaksanaannya bermacam-macam sesuai dengan kebutuhannya.

3) Pembinaan Sarana dan Prasarana

Pembinaan sarana dan prasarana tak dapat dipisahkan dari masalah yang berhubungan dengan tanah sekolah, bangunan fisik gedung sekolah, perabot-perabot sekolah, bangsal-bangsal sekolah, ruang perpustakaan, dan lain sebagainya.

Hal-hal tersebut di atas itulah yang harus diperhatikan dalam membina dan mengembangkan sarana dan prasarana. Pengurus yayasan mengupayakan pembinaan aspek-aspek tersebut di atas dan mengadministrasikannya dengan sebaik-baiknya, karena aspek-aspek tersebut bagian yang tidak dapat terpisahkan, dengan kondisi pendidikan dan pengajaran.

Selanjutnya agar proses pendidikan dan pengajaran dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, maka pemenuhan sarana dan

¹⁸ Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h.169.

prasarana yang sesuai dengan administrasi sekolah sangat diperlukan.

4) Pengawasan Pengguna Biaya Secara Efisien

Dana adalah merupakan roda dari keberhasilan tujuan suatu organisasi termasuk di dalamnya organisasi pendidikan.

Pengurus yayasanlah yang berkewajiban menyediakan semua biaya untuk operasionalnya pendidikan dan pengajaran. Dengan berbagai macam cara yayasan mengusahakan penggalan sumber dana, baik dari pemerintah, dari wali murid maupun masyarakat. Sebagai partisipasi aktif mereka dalam memajukan pendidikan dan pengajaran di negeri ini.

Terkumpulnya dana dari berbagai pihak tersebut di atas itulah yang biasanya dipergunakan untuk mengelolah pendidikan oleh yayasan. Bagi yayasan yang besar masalah dana biasanya bukan persoalan lagi, karena dengan kebesarannya tersebut partisipasi warga masyarakat tidak diragukan lagi. Tetapi bagi yayasan yang masih kecil, masalah dana benar-benar merupakan masalah yang pelik.

Itulah sebabnya maka masalah keuangan merupakan dinilai yang paling rawan dalam kegiatan jalannya organisasi pendidikan. Hal ini karena banyak kasus-kasus yang terjadi berkenaan dengan masalah keuangan itu.

Padahal suatu organisasi tak akan bisa hidup tanpa di dukung oleh dana yang cukup. Keuangan sering menjadi manusia daratan sehingga sering pula terjadi kebocoran keuangan diberbagai sektor. Maka pengurus yayasan hendaknya pandai membuat rambu-rambu yang dapat mengatasi kebocoran tersebut, diantaranya perlunya kepala sekolah membuat program tahunan dengan menyebutkan satuan biaya dari sub-sub programnya yang akan dilaksanakan. Dari sinilah dapat diketahui jumlah anggaran pertahun. Kepala sekolah bertanggung jawab kepada yayasan terhadap semua pengeluaran sekolah yang di pimpinnya. Dengan demikian pengurus yayasan akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pengguna dana yang telah dikeluarkan, karena telah adanya acuan yang berupa program kerja tahunan yang telah dibuat oleh kepala sekolah selaku pimpinan suatu lembaga pendidikan.

Pengawasan keuangan memang sangat penting arti untuk diintensifkan, agar tidak terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan program dan satuan-satuan biayanya yang telah disahkan dan disetujui oleh pengurus yayasan. Dan pada akhirnya dapat diharapkan pengguna dana yang sesuai dengan pos-posnya, sehingga takkan ada program yang tertunda karena tidak ada dana.

Dengan terlaksanannya seluruh program kerja secara efektif dan efisien, berarti kualitas pendidikan dan pengajaran pada lembaga

pendidikan tersebut tetap terkendali dan berarti pula bahwa pendidikannya tergolong kwalified dan terjamin.

Efisiensi dan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran sangat mutlak diperlukan agar semua pengeluaran dana tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan oleh pengurus yayasan.

Dalam keadaan bagaimanapun anggaran sudah ditentukan oleh kebutuhan administrasi, tidak dapat digunakan untuk membayar kebutuhan sekolah, begitu juga anggaran–anggaran yang lain. Jadi praktis pengelolaannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.

Sebaliknya pelaksanaan adminstrasi keuangan itu mengikuti petunjuk administrasi keuangan, seperti buku kas, buku leger gaji, buku kas harian, dan lain-lainnya.¹⁹

Untuk menghindari peyalahgunaan uang sekolah maka hal-hal di bawah ini perlu diperhatikan:

- a) Sebaiknya orang memegang kas tidak sekaligus memegang pembukuannya.
- b) Setelah uang di terima harus dibukukan dan di tulis sesuai dengan mata anggaran masing-masing.
- c) Pengguna uang tersebut harus ada bukti dokumen berupa kwitansi atau bukti lain yang sah.
- d) Semua pengeluaran harus dibukukan.

¹⁹ Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h.230

- e) Setiap dokumen yang dijadikan bukti pengeluaran diberi nomor, tanggal dan harus diketahui/diparaf oleh pejabat yang bertanggung jawab (Kepala Sekolah).
- f) Tiap halaman buku harus diberi huruf dan paraf dari pemegang buku kas.
- g) Kesalahan-kesalahan tidak boleh dihapus harus digaris atau dicoret baik-baik dan dibubuhkan paraf.
- h) Buku kas dibuka dan ditutup tiap bulan meskipun tidak ada pemakaian/pemasukan dan pengeluaran.
- i) Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan harus diadakan pengawasan yang kontinue.
- j) Kepala sekolah agar petugas sekolah benar-benar memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang itu.

Dengan demikian mengikuti pengguna dan melaksanakan pengelolaan uang sesuai dengan petunjuk administrasi keuangan adalah salah satu upaya untuk mengefisiensikan dana yang tersedia. Dengan penghematan dana tersebut maka pengurus yayasan akan mampu mengusahakan dana pendidikan tersebut tanpa adanya penyimpanan dalam penggunaan dana yang ada.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengawasan penggunaan dana secara efisien akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan.

C. Korelasi Antara Tanggung Jawab Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Dan Kualitas Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama.

1. Pengertian Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif.

Lembaga Pendidikan Ma'arif yaitu sebuah lembaga berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang mana mempunyai maksud dan tujuan yang terdapat dalam akte notaris pasal ke-8. Dalam hal ini Lembaga Pendidikan Ma'arif juga berusaha untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan agar menjadi berkualitas sebagaimana yang tercantum dalam akte notaris pasal ke-9 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah/madrasah-madrasah dari tingkat pendidikan pra sekolah sampai perguruan tinggi.
- b) Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan non formal.
- c) Mengadakan dan meralat sarana dan prasarana pendidikan.
- d) Mempersiapkan dan menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan pendidikan.
- e) Mengadakan majlis ta'aruf dan tarjamah, majlis pengembangan pendidikan, majlis penelitian, dan perpustakaan.

- f) Mengadakan hubungan dengan lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan di dalam dan di luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.
- g) Mengadakan usaha-usaha lain yang bermanfaat dan berguna bagi lembaga.

2. Pengetian Kualitas Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama.

Dalam hal ini yang di maksud dengan kualitas yaitu di dalam membenahan kurikulum yang dapat memberikan kemampuan dan ketrampilan dasar minimal (minimum basic skill), kompetensi dan profesional tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan mereka melalui pendidikan dan pelatihan.

Begitu juga dalam hal penetapan standar kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi persyaratan bagi setiap lembaga pendidikan dasar dan menengah, sehingga sekolah dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal. Dan juga penciptaan iklim dan suasana kompetatif dan komperatif antar sekolah dalam memajukan dan meningkatkan kualitas siswa dan sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas tentang Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif dan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jalinan kerja sama antara pengurus yayasan dengan sekolah maka akan semakin terkoordinir dengan baik dalam berbagai hal, dan juga dapat memajukan kualitas dari sekolah

tersebut dikarenakan selalu ada pengawasan dan pembinaan dari pengurus yayasan terhadap sekolah tersebut.